

Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Pembangunan Kesehatan Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng

Indriani Pallawa (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Rabina Yunus (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: Indriani30@yahoo.co.id

Abstract

This writing aims to determine the role of women in the leadership of the government, in the palopo city and to investigate inhibiting factors and supporting factors that influencing the role and involvement of women in leadership at the palopo city. the results showed that the involvement of women in the leadership of the government in the palopo city already good, the women involved in leadership at the palopo city is known to be involved in the process of interaction with the society and if there is a problem in society, women are more caring, quick response and immediately resolve the existing problems. Culture, education and capabilities is highly affecting the involvement of women in leadership, a sign of good education and good capability. besides that women would not be able to become a leader in particular regards governance.

Keywords: women, leadership, palopo city

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran dan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo sudah cukup baik, selain itu perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo memang dikenal lebih ikut terlibat dalam proses interaksi dengan masyarakatnya serta jika ada masalah di masyarakat, perempuan lebih peduli, cepat mananggapi dan langsung menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Budaya, pendidikan dan kapabilitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, tanpa pendidikan dan kapabilitas yang baik perempuan tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin khususnya dalam pemerintahan.

Kata kunci: perempuan, kepemimpinan, kota palopo

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan

rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau stereotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Budaya dan tradisi sangat berperan dalam membentuk stereotipe yang cukup besar. Untuk mereposisi peran perempuan dalam masyarakat, maka konsep gender lahir merekonstruksi hubungan laki-laki dan per-

empuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender, laki-laki atau perempuan. Setiap

individu baik laki-laki maupun perempuan berhak memasuki berbagai bidang kehidupan menurut bakat dan preferensinya masing-masing. Apabila kondisi yang menyebabkan peran salah satu gender terpinggirkan, termarginalkan, terdiskriminasi, tersubordinasi atau menambah beban kerja tidak segera dikurangi, maka jurang kesenjangan antara perempuan dan laki-laki akan semakin besar.

Dalam Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing pada tahun 1995 diidentifikasi 12 bidang perhatian utama masalah gender, yaitu kemiskinan dan perempuan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dalam kekuasaan dan pembuatan keputusan, mekanisme institusi bagi kemajuan perempuan, hak asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan, dan kekerasan terhadap anak perempuan.

Sejarah panjang perjalanan Indonesia dari zaman penjajahan, pergerakan dan perjuangan menuju Indonesia merdeka sampai saat ini tentu menjadi jalan panjang pula atas pengabdian dan perjuangan serta peran putra-putri bangsa. Seperti yang tertuang dalam kesepakatan yang kita kenal dengan wujud Sumpah Pemuda, maka dapat kita cermati bahwa kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberi peluang yang sama antara kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini diperkuat oleh UU Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46 "Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan

umum menuju keadilan dan kesetaraan gender".

Berbagai perangkat hukum telah dikeluarkan dan ditetapkan untuk melaksanakan proses menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi realita yang terjadi bahwa semua itu belumlah cukup untuk berfungsi sebagai piranti kekuatan yang menghantarkan kaum perempuan menjadi mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Sudah cukup banyak landasan hukum yang dibuat baik formal maupun tidak formal, berupa undang-undang, aturan dan konvensi di tingkat nasional maupun internasional yang membahas tentang peranan/penyertaan hak antara laki-laki dan perempuan pada semua bidang, misalnya INPRES Nomor 9 Tahun 2000

Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa "seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintah nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan", Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. CEDAW (Convention on the Elimination of Form Deskrimination Against Woman) UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan deskriminasi terhadap perempuan serta UU.no.10 Tahun 2008 pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 tentang kuota perempuan di kursi legislatif.

Kini gerakan perempuan di Indonesia sudah seharusnya memperjuangkan bagaimana perempuan menjadi pemimpin, atau how to be a leader. Ini harus disosialisasikan tidak hanya berbentuk penyadaran terhadap kaum perempuan semata, tapi juga mengarah pada penyadaran kritis kaum laki-laki. Karena alasan kodrati perempuan sering di sudutkan pada keadaan yang tidak menguntungkan.

Hal ini kerap kali menghilangkan kesempatan perempuan untuk membuktikan kapasitas dan kapabilitas mereka dan agama pun sering dijadikan alasan untuk melegitimasi atas dikrimatis ketidakadilan terhadap perempuan. Sudah seharusnya hal seperti perempuan masih lebih banyak menjadi objek ketimbang menjadi subjek yang disebabkan salah satunya oleh budaya patriarkhi yang telah berhasil mengerdilkan jiwa dan mengikis kepercayaan diri kaum perempuan itu dihapuskan. Memang, mendobrak budaya patriarkhis yang sedemikian kuat bahkan mendarah daging, tidaklah semudah membalik telapak tangan, tetapi diperlukan berbagai upaya simultan agar lebih menyentuh pada persoalan. Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam proses kepemimpinan dalam pemerintahan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pemerintahan. Seperti yang terlihat pada kepemimpinan pemerintahan yang ada di kota Palopo. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota sejak tahun 2002. Jika mengulik sejarah panjang mengenai kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Luwu, tidak lepas dari sejarah kepemimpinan pemerintahan Batara Guru (Datu/Pajung Luwu I), dimana kekuasaannya yang dikenal mutlak dan tidak terbatas. Semua kebijakan terganggu dalam kekuasaan datu/pajung dan tidak ada pihak yang berhak membantah atau melarang. Datu merupakan gelar yang diberikan kepada penguasa (raja) di kedaduan Luwu. Datu memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, khususnya dalam memutus-

kan masalah-masalah kenegaraan. Jabatan tersebut merupakan jabatan turun temurun, baik dari garis keturunan ibu atau garis keturunan ayah. Pajung merupakan gelaran yang diberikan oleh Dewan Hadat Luwu kepada seorang datu setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Tidak semua datu bergelar pajung, tetapi semua pajung adalah datu karena yang berhak diangkat menjadi pajung hanya seorang yang sedang menjabat sebagai datu.

Dalam sejarah pemerintahan Kedaduan Luwu, dikenal beberapa Pajung/Datu yang telah memerintah di Kedaduan Luwu, 4 orang diantaranya adalah perempuan.

Sejak masa kepemimpinan Datu/Pajung perempuan di Kedaduan Luwu, terjadi berbagai kemajuan di Kabupaten Luwu itu sendiri baik dari segi politik, hukum maupun dalam segi perdagangan yang mampu menciptakan kemakmuran pada masyarakat. Datu/Pajung perempuan yang pernah memerintah di Kedaduan Luwu yakni Pajung/Datu X bernama Datu Ri Sao Lebbi yang dikenal dengan sikap tenang terpadu dengan keberanian yang menjadikannya pemimpin yang cukup arif di masanya. Kedua yakni Pajung/Datu XIV bernama Pajung/Datu We Tenri Rawe yang memerintah Luwu dengan sikap tegas sehingga membawa perkembangan yang pesat pada bidang perdagangan sehingga mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat Luwu, selain itu sistem hukum pada masa itu semakin ditegakkan dimana setiap pelanggaran hukum berat akan dipenggal. Ketiga yakni Pajung/Datu Luwu XXIV dan XXVI bernama Pajung/Datu We Tenri Leleang Petta Matinroe Ri Soreang yang memerintah Luwu sebanyak dua kali tetapi karena peristiwa pembunuhan suami pertamanya yang dilakukan oleh saudaranya sendiri menyebabkan kondisi politik di Luwu agak sedikit terganggu pada saat itu. Keempat yakni Pajung/Datu XXVIII bernama Pajung/Datu We Tenri awaru (Sulthana Hawa Petta Matinroe Ri Tengngana Luwu).

Jika melihat kondisi kepemimpinan pemerintahan yang ada di Kota Palopo saat ini, dari banyaknya pemimpin yang menduduki jabatan struktural pemerintahan ternyata tidak hanya laki-laki yang terlibat tetapi ada pula sosok pemimpin perempuan yang ikut berperan dalam jabatan struktural tersebut yaitu terdapat 12 lurah perempuan dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo serta ada 2 camat perempuan dari 9 kecamatan yang ada. Selain itu, terdapat 2 SKPD yang dipimpin oleh perempuan dari 32 SKPD. Dari beberapa fakta yang peneliti lihat melalui data dan pengamatan-pengamatan sementara, yang ingin peneliti kaji saat ini, bagaimana respon ketertarikan perempuan di Kota Palopo untuk terlibat dan ikut berperan dalam kepemimpinan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender dalam Kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palopo. Dalam berbagai kegiatan pembangunan atau produksi, penduduk berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Kontribusinya terhadap terhadap suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi kerja. Kota Palopo sendiri tidak lepas dari hal tersebut, dimana penduduknya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama dalam dunia publik khususnya dunia politik dan pemerintahan un-

tuk menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Kota Palopo dalam meningkatkan peran gender dalam pemerintahan khususnya telah menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan lagi. Hasil wawancara dengan salah satu lurah yaitu Lurah Binturu Ibu Sabiha, SH, mengatakan bahwa di Kota Palopo perempuan dan laki-laki telah memiliki kesetaraan untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan karena saat ini tidak ada perempuan juga telah memiliki kemampuan yang dapat disejajarkan dengan laki-laki. "Sekarang sudah jaman emansipasi wanita, jadi tidak ada batasan lagi ketika perempuan juga ingin ikut berpartisipasi dalam dunia publik khususnya menjadi pemimpin dalam pemerintahan tanpa adanya hambatan dari luar. Perempuan di palopo sudah dapat diperhitungkan keberadaannya di dunia publik karena mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin." Ujar Ibu Sabiha (Wawancara, 13 Januari 2014).

Saat ini di Kota Palopo, perempuan yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan sudah dapat diperhitungkan keberadaannya. Dalam jabatan struktural pemerintahan, perempuan telah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis, diantaranya yakni dari 32 SKPD yang ada, terdapat 2 SKPD yang dipimpin oleh perempuan serta terdapat 2 camat perempuan dari 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo.

Jabatan strategis dalam kepemimpinan pemerintahan yang juga terdapat peran perempuan didalamnya yakni adanya 12 lurah perempuan dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo. Menurut Wakil Walikota Palopo, yakni Bapak Akhmad Syarifuddin jumlah tersebut telah menunjukkan persentase perempuan sangat besar diakomodir dalam Pemerintahan di Kota Palopo, bahkan dalam struktur-struktur pemerintahan yang lainnya perempuan cukup dominan berperan di dalamnya. "Peran perempuan dalam

pemerintahan di Kota Palopo sudah sangat luar biasa karena persentase perempuan sangat besar diakomodir dalam Pemerintahan, untuk camat saja perempuan berjumlah 3 orang bahkan sebelumnya perempuan yang menjadi camat berjumlah 4 orang dan jika di persentasikan jumlah perempuan dalam pemerintahan sudah lebih dari 30% termasuk dalam struktur-struktur pemerintahan yang lain perempuan cukup dominan dalam berperan di dalamnya. (Wawancara 22 Januari 2015)" Sumber : BPS Kota Palopo

Gender di Kota Palopo memang telah berkembang dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya Palopo menjadi salah satu daerah dari 7 Kabupaten Kota di Sulawesi-Selatan yang mendapatkan penghargaan mengenai pengarusutamaan gender dari pemerintah pusat. Lanjut dikatakan oleh Bapak Wakil Walikota Palopo, daerah yang terpilih mendapatkan penghargaan mengenai pengarusutamaan gender adalah daerah yang memang melaksanakan semua program-program pemerintahan yang menyangkut pengarusutamaan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Palopo dalam komitmennya terhadap peran gender dalam pemerintahan khususnya sudah sangat luar biasa. "Perempuan di Kota Palopo sudah sangat banyak yang ikut berperan dalam pemerintahan, itu berarti komitmen kita terhadap peran gender itu sudah sudah luar biasa, itulah yang mengakibatkan Palopo kemarin mendapatkan penghargaan kaitannya dengan pengarusutamaan gender yang langsung dari Presiden karena Palopo menjadi salah satu dari tujuh kabupaten kota di Sulawesi selatan yang menerima penghargaan mengenai pengarusutamaan gender. Penghargaan tersebut dilihat dari beberapa aspek diantaranya benarkah program-program perempuan di suatu wilayah sudah berjalan dengan baik, aktifkah organisasi-organisasi perempuan di wilayah tersebut serta keterlibatan perempuan di berbagai sektor apakah memang sudah ada. Dalam proses

rekrutmennya sendiri, pemerintah memakai standar yang lazim yakni minimal melihat dari sisi kepangkatan serta pengalaman kerja serta menempatkannya sesuai kompetensi dan kemampuannya.

Kepemimpinan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Palopo. Kini gerakan perempuan sudah seharusnya memperjuangkan bagaimana perempuan menjadi pemimpin. Ini harus disosialisasikan tidak hanya berbentuk penyadaran terhadap kaum perempuan semata, tapi juga mengarah pada penyadaran kritis kaum laki-laki. Karena alasan kodrati perempuan sering di sudutkan pada keadaan yang tidak menguntungkan. Hal ini kerap kali menghilangkan kesempatan perempuan untuk membuktikan kapasitas dan kapabilitas mereka. Untuk meningkatkan kualitas peran perempuan, diperlukan komitmen yang kuat dikalangan elit pemerintahan untuk secara sungguh-sungguh menjamin kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan pemerintahan khususnya dalam menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Di kota palopo sendiri, pemerintah memiliki beberapa pertimbangan dalam memilih pemimpin yang memang sesuai dengan kondisi pemerintahan Kota Palopo itu sendiri.

Partisipasi kaum perempuan dalam sektor publik merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan sebagai insan dan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Peran aktif perempuan dalam pembangunan hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan diri yang dapat dilihat pada bidang-bidang yang memberi pengaruh luas di sektor publik meliputi politik dan sektor pemerintahan. Partisipasi perempuan memberikan kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual menuju terwujudnya kemitrasejajaran antara laki-laki yang selaras, serasi, dan seimbang yang dilandasi saling menghormati, saling menghargai, saling membutuhkan dan saling mengisi.

Dengan demikian akan terdapat persamaan status, kedudukan, hak kewajiban dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran masing-masing.

Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya, yakni perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan pengikut, memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, di mana melakukan hal tersebut, bagaimana melakukannya, dan melakukan pengawasan secara ketat kepada pengikutnya. Selain itu, seorang pemimpin mengatur dan merumuskan peranan-peranan dari anggota-anggota kelompok atau para pengikut, menerangkan kegiatan yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota, kapan dilakukan, dimana melaksanakannya, dan bagaimana tugas-tugas itu harus dicapai. Jika melihat pemimpin pemerintahan di Kota Palopo khususnya perempuan, mereka memiliki cara tersendiri dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Herman Rahim, SH selaku Camat Wara Timur, perempuan dikenal dengan sikap yang lebih amanah jika diberi tanggung jawab serta lebih menggunakan hati nurani dalam bertindak. "Untuk sekarang hampir semua kegiatan pemerintahan di Kota Palopo melibatkan perempuan didalamnya. Semua kaum perempuan di kota palopo memiliki peluang yang sama untuk ikut berpartisipasi di dunia publik, karena perempuan lebih dikenal dengan sifat disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Serta memiliki kedekatan yang lebih dengan masyarakat dibandingkan dengan laki-laki. Contoh nyata yaitu ketika

adanya intruksi dari atasan untuk menghadiri rapat dan pengumpulan warga, perempuan lebih cepat dalam pelaksanaannya jika dibandingkan dengan laki-laki. Semua amanah yang diberikan oleh pimpinan, harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan program-program kegiatan yang harus dilaksanakan. Laki-laki biasanya lebih berfikir dua kali jika ingin melangkah sedangkan perempuan lebih menggunakan hati nurani dalam bertindak.

Selain itu, perilaku mendukung juga biasanya dilakukan oleh para pemimpin yakni sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan para pengikut dalam pengambilan keputusan. Di Kota Palopo, pemimpin perempuan jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki, memang dikenal lebih ikut terlibat dalam proses interaksi dengan masyarakatnya. Contoh perilaku mendukung yang lain dilakukan oleh salah satu informan yang menjadi Lurah Tompotikka yakni Ibu Naimah Basmin, S.Sos mengatakan bahwa cara pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi daerah dan kondisi masyarakat yang dipimpinya. Menurut beliau, hal yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin adalah 75% berada di lapangan atau berada di sekitar masyarakatnya dan hanya 25% untuk berada di kantor. Karena peran perempuan sebagai seorang pemimpin juga sudah dapat dilihat ketika mereka terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sosial yang ada disekitarnya sehingga jika terdapat masalah-masalah di dalam masyarakat, dapat langsung diselesaikan oleh pemimpin tersebut tanpa melalui perantara. "Sebagai lurah, cara pendekatan saya dengan masyarakat yakni dengan terjun langsung ke lapangan karena hal yang harus dilakukan seorang lurah itu 75% harus berada

dilapangan dan 25% hanya berada di kantor. Setiap pagi kita melakukan kunjungan-kunjungan kerumah warga untuk melihat kondisi wilayah, selalu ikut serta di setiap pertemuan RT dan RW, mengadakan jumat bersih untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat serta menghadiri setiap undangan kegiatan yang dilakukan warga. Karena Peran perempuan juga sudah dapat dilihat keberadaannya ketika mereka terjun langsung kelapangan untuk memimpin masyarakatnya.

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai satu sasaran tertentu. Pada dasarnya perempuan memiliki perbedaan kebutuhan dengan laki-laki, aspirasi mereka kiranya lebih dipahami oleh perempuan pula. Maka sangatlah dibutuhkan sosok perempuan untuk ikut serta bersama laki-laki untuk memikirkan kesejahteraan bersama khususnya dalam menjadi seorang pemimpin. Faktor-faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo Budaya atau nilai lokal yang dianut di Kota Palopo

Nilai lokal merupakan sebuah budaya yang dimiliki oleh setiap daerah atau biasa disebut dengan kearifan lokal. Peneliti ingin mengkaji apakah indikator nilai lokal atau budaya yang ada di Kota Palopo ini berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo.

Budaya masyarakat Palopo berkaitan erat dengan pandangan kosmos atau alam jagat raya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kota Palopo tidak jauh berbeda dengan masyarakat tanah Luwu pada umumnya. Jika mengulik sejarah panjang mengenai kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Luwu, tidak lepas dari sejarah kepemimpinan pemerintahan Batara Guru (Datu/Pajung Luwu I), dimana kekuasaannya yang dikenal

mutlak dan tidak terbatas. Datu memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, khususnya dalam memutuskan masalah-masalah kenegaraan. Datu dipandang sebagai dewa yang selanjutnya diturunkan statusnya menjadi dewa yang berwujud manusia atau Manusia Dewa. Dari banyaknya Datu yang pernah memimpin di Kabupaten Luwu, 4 orang diantaranya adalah perempuan. Selama kepemimpinan Datu perempuan, kerajaan Luwu dalam keadaan stabil karena kepemimpinannya yang dikenal tegas dan merakyat.

Menurut pandangan Alisjahbana (1982:47), sistem sosial budaya baru atau sistem kebudayaan modern sangat menjunjung nilai-nilai teori, nilai ekonomi dan nilai solidaritas. Dalam sistem budaya ini, menjadi ibu dan menjadi istri adalah sebuah pilihan. Karena sifatnya yang opsional, seorang perempuan tidak memiliki keharusan untuk menjalankan peran itu. Peran-peran hasil konstruksi sosial dapat diperjuangkan untuk dapat berubah melalui proses panjang dan terus-menerus. Untuk menjadi maju, perempuan harus meraihnya sendiri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai teori dan ekonomi. Laki-laki hanyalah sebagai mitra atau teman dalam berproses itu, bukan menjadi penentu bagi "proses menjadi" perempuan.

Menurut Kepala SKPD Tata Ruang dan Cipta Karya, bapak Muhammad Irwan Alwi mengatakan bahwa kendala nyata yang dihadapi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ranah publik khususnya dalam kepemimpinan pemerintahan adalah faktor larangan dari keluarga karena kodrat utama perempuan yakni mengurus rumah tangga. "Biasanya yang menjadi penghalang perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kepemimpinan pemerintahan itu hanyalah faktor dari keluarganya karena tidak dapat dipungkiri bahwa tugas utama seorang perempuan itu adalah mengurus rumah tangganya." (Wawancara 19 januari 2015).

Namun pendapat lain mengatakan bahwa mengurus rumah tangga bukanlah halangan bagi perempuan untuk dapat ikut berperan dalam dunia publik, yang terpenting adalah ada batasan-batasan tertentu bagi perempuan untuk ikut berperan aktif di dunia publik tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan. Di Kota Palopo sendiri partisipasi perempuan sudah sangat baik keikutsertaannya sebagai pemimpin dalam pemerintahan, bahkan tidak ditemukan lagi. "Untuk budaya yang biasa berkembang di masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya mengurus rumah tangga sepertinya tidak berlaku lagi karena buktinya sekarang sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di ranah publik, tetapi paling tidak ada batasan-batasan untuk perempuan agar terlibat langsung di ranah publik. Di Kota Palopo sendiri, partisipasi perempuan untuk ikut dalam proses kepemimpinan pemerintahan sudah cukup baik, buktinya sudah jarang atau bahkan tidak ditemui lagi hambatan dari keluarga untuk larangan bagi perempuan untuk ikut terjun ke dunia publik." Ujar Bapak Amin (Wawancara 13 Januari 2015). Setiap individu baik laki-laki maupun perempuan berhak memasuki berbagai bidang kehidupan menurut bakat dan preferensinya masing-masing. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama. Perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, salah satunya adalah menjadi pemimpin. Budaya, tradisi, dan kebiasaan seperti anggapan atau bahkan keyakinan bahwa status perempuan yang rendah di dunia publik sering menjadi hambatan bagi perempuan untuk dapat berperan aktif dalam pemerintahan. Peran perempuan yang sangat terbatas dalam pembuatan kebijakan dan posisi kepemimpinan disebabkan oleh kondisi sosial budaya yang mempersulit perempuan terlibat secara penuh di dalamnya.

Menyimak dari hasil wawancara tersebut, pada kenyataannya budaya yang masih menghambat tidaklah berasal dari nilai lokal daerah, tetapi lebih kepada budaya yang masih menggerogoti cara pandang dan cara berpikir perempuan yang menganggap bahwa perempuan itu memang lebih cocok jika berada di rumah dan hanya mengurus rumah tangga saja tanpa memberikan kesempatan kepada dirinya untuk dapat berperan di dunia publik khususnya menjadi seorang pemimpin. Pada dasarnya tidak ada satu daerahpun di Kota Palopo yang secara adat melarang ataupun membatasi kaum perempuan untuk berkarir dan menjadi seorang pemimpin khususnya dalam dunia publik. Karena jika melihat sejarah kepemimpinan di Kota Palopo sejak jaman kerajaan Luwu, perempuan telah membuktikan keterlibatannya dalam proses pemerintahan yakni dengan melihat adanya beberapa masa dimana perempuan telah menjadi Datu yang memimpin kerajaan Luwu. Pendidikan yang dimiliki perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan Pendidikan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 merupakan tugas pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Menurut teori human capital, kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh tingkat kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan (keahlian) tenaga kerja dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas (Effendi, T ;1993 ; 17). Artinya, produktivitas disatu pihak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilain pihak dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penduduk.

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka produktivitas pendidikan semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang ditamatkan maka produktivitasnya semakin rendah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala SKPD Tata Ruang dan Cipta Karya yaitu Bapak Muhammad Irwan Alwi yang mengatakan bahwa jenjang pendidikan merupakan hal yang patut dipertimbangkan ketika menjadi seorang pemimpin. Perempuan harus memiliki kemampuan baik kecerdasan akademik maupun kecerdasan melalui pengalaman yang dimiliki. "Jenjang pendidikan merupakan hal yang patut dipertimbangkan ketika menjadi seorang pemimpin. Perempuan harus memiliki kemampuan baik itu kecerdasan akademik maupun kecerdasan melalui pengalaman yang dimiliki. Penting seorang perempuan untuk memiliki pendidikan yang tinggi karena perempuan saat ini sudah dapat disetarakan dengan laki-laki, yang penting perempuan tersebut dapat memimpin dengan baik dan memiliki kemauan kerja yang tinggi." (Wawancara 19 Januari 2015). Perempuan yang menjadi seorang pemimpin selain memiliki pendidikan yang tinggi, pengalaman organisasi juga dapat menjadi penunjang yang baik untuk menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan dan jabatan yang disandangnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah (GBHN,1999) bahwa keberhasilan pembangunan dapat dirasakan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, taraf hidup dan pekerjaan. Strategi pembangunan Kota Palopo yang dikenal dengan Kota Tujuh Dimensi, dengan menempatkan prioritas kedua adalah sebagai Kota pendidikan, seperti halnya dengan daerah lainnya juga mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan maka kualitas sumber daya manusia akan semakin tinggi. Tetapi jika melihat kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perempuan di Kota Palopo, memang belum bisa disetarakan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh laki-laki. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Dahri Saleng sebagai kepala SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, jika melihat jumlah perempuan yang terlibat di dunia publik khususnya pemerintahan memang lebih banyak tetapi laki-laki lebih memiliki sumber daya manusia yang baik. "Jika melihat jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat di dunia publik khususnya pemerintahan memang lebih banyak jumlah perempuan yang mengisi jabatan-jabatan strategis dibandingkan dengan laki-laki tetapi jika melihat SDM yang dimiliki, masih dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih memiliki SDM yang baik dibandingkan dengan perempuan." (Wawancara 15 Januari 2015). Tingkat pendidikan perempuan yang pada umumnya rendah, semakin memperburuk permasalahan kurangnya perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan. Menurut penjelasan salah satu informan yang berprofesi sebagai camat, salah satu hal yang mengakibatkan saat ini masih ada perempuan di kota palopo yang tidak bisa terlibat dalam dunia pemerintahan atau tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan yakni latar belakang pendidikannya yang masih kurang atau masih sangat terbatas, tidak memiliki pengalaman organisasi yang baik, kurang memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar sehingga dengan sendirinya perempuan tersebut tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk tampil didepan umum dalam hal mengemukakan pendapat dan cukup lambat dalam mengambil keputusan jika menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut adanya penyelesaian dari

masalah tersebut. "Hal yang mengakibatkan saat ini masih ada perempuan di kota palopo yang tidak bisa terlibat dalam pemerintahan atau tidak memiliki kesempatan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan yakni latar belakang pendidikannya yang masih terbatas, tidak memiliki pengalaman organisasi, kurang memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dengan sendirinya perempuan tersebut tidak memiliki kepercayaan diri untuk tampil didepan umum dalam hal mengemukakan pendapat dan cukup lambat dalam mengambil keputusan. Kapabilitas Perempuan untuk Terlibat dalam Kepemimpinan Pemerintahan Membahas mengenai kapabilitas agar dapat berperan dalam dunia publik dan untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya hal yang menjadi landasan utama adalah dengan melihat ukuran tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang dimiliki seseorang tersebut. Kedua hal ini adalah hal yang wajib bagi perempuan agar yang berperan dalam dunia publik khususnya pemerintahan adalah insan-insan yang berkualitas.

Kepemimpinan merupakan sebuah sikap bagaimana mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai sebuah tujuan dengan visi dan misi yang kuat, hal tersebut tidak terbatas dalam menjadikan perempuan sebagai pemimpin bahkan melalui kemampuannya perempuan dapat lebih diperhitungkan jika dibandingkan dengan laki-laki.

Karakteristik kepemimpinan pada umumnya dimanapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu dia harus kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna bersama-sama berjuang, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya juga bersangkutan, serta cocok dengan situasi dan

zamannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu camat yaitu Ibu Hj. Suriani Andi Kaso yang mengatakan bahwa perempuan yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki dinamika selain itu diperlukan pula seni dalam memimpin. "Perempuan jika ingin menjadi pemimpin yang baik, memang harus terlebih dahulu melewati banyak proses dari bawah agar kemampuan yang dimiliki dapat diasah terlebih dahulu. Perempuan untuk menjadi pemimpin harus memiliki dinamika, perempuan tidak boleh lemah karena jika lemah tidak bisa berhasil. Pemimpin perempuan jika memiliki dinamika harus pula memiliki seni dalam memimpin, bukan pemimpin jika tidak pernah marah, bukan pemimpin jika tidak tegas, dan bukan pemimpin jika tidak disiplin." (Wawancara 14 Januari 2015).

Perempuan yang menjadi pemimpin di Kota Palopo memang memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan ditopang dengan pengalaman organisasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan yang tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam kepemimpinan pemerintahan dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh seorang Lurah yakni Ibu Subiha, SH yang menegaskan bahwa masih adanya perempuan di Kota Palopo yang tidak bisa menjadi pemimpin dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan baik itu dari segi pendidikan maupun pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi sendiri sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin karena banyak hal yang tidak didapatkan dibangku pendidikan tetapi diperoleh melalui pengalaman organisasi. "Tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya perempuan di Kota Palopo yang tidak bisa berperan dalam dunia publik, hal tersebut biasanya diakibatkan karena perempuan tersebut tidak

memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang baik. Pengalaman organisasi itu sangat penting, karena banyak hal yang tidak diajarkan di bangku pendidikan tetapi diperoleh melalui pengalaman organisasi, contohnya saja bagaimana kita dapat berbicara di depan umum dengan baik serta bagaimana kita menjadi pemimpin yang dapat didengar oleh bawahannya” (Wawancara 13 Januari 2015).

Perempuan sebagai satu kategori pembuat kebijakan, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, yakni bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan. Mempertimbangkan kepentingan perempuan serta melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender

KESIMPULAN

Secara kuantitas, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan. Kota Palopo dalam meningkatkan peran gender dalam pemerintahan khususnya telah menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan lagi. Saat ini di Kota Palopo, perempuan yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan sudah dapat diperhitungkan keberadaannya. Dalam jabatan struktural pemerintahan, perempuan telah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis, diantaranya yakni dari 32 SKPD yang ada, ter-

dapat 2 SKPD yang dipimpin oleh perempuan serta terdapat 2 Camat perempuan dari 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo. Jabatan strategis dalam kepemimpinan pemerintahan yang juga terdapat peran perempuan didalamnya yakni adanya 12 lurah dari 48 kelurahan yang ada di Kota Palopo.

Pemimpin perempuan memiliki cara tersendiri dalam menjalankan kepemimpinannya. Perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo memang dikenal lebih ikut terlibat dalam proses interaksi dengan masyarakatnya. Jika ada masalah di masyarakat, perempuan lebih peduli, cepat menanggapi dan langsung menyelesaikan masalah yang ada tersebut.

Dengan melihat kuantitas keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo, tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat perempuan-perempuan untuk tertarik melibatkan dirinya dalam dunia publik khususnya pemerintahan.

Membahas mengenai budaya yang berkembang di masyarakat, saat ini sudah tak nampak lagi adanya deskriminasi atau marginalisasi seperti zaman dahulu kala, perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk dapat ikut terlibat dalam dunia pemerintahan tanpa adanya batasan-batasan yang bersifat mengikat. Jika melihat kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo bukanlah hal yang baru jika yang menjadi pemimpin adalah perempuan karena sejak zaman kerajaan dahulu beberapa perempuan pernah menjadi pemimpin dalam kerajaan tersebut. Hal yang masih menghambat perempuan untuk melibatkan dirinya dalam dunia pemerintahan biasanya adalah banyaknya anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan jika terlibat dalam dunia kerja dapat melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga karena akan lebih fokus pada pekerjaannya. Tapi disinilah peran perempuan untuk dapat membuktikan bahwa mereka juga memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki

untuk dapat berkarir di dunia publik tidak hanya sekedar mengurus rumah tangga.

Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan. Bekal ini sangat penting dimiliki untuk selanjutnya diasah terus menerus. Perempuan-perempuan di Kota Palopo dari segi latar belakang pendidikan yang dimiliki sudah cukup baik, bahkan beberapa pemimpin perempuan dalam pemerintahan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sehingga hal tersebut menjadi penghambat bagi perempuan-perempuan di Kota Palopo untuk ikut berperan dalam kepemimpinan pemerintahan.

Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang menjadi kendala bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan yakni kapabilitas yang dimiliki, karena latar belakang pendidikan dari bangku sekolah dianggap belum cukup memadai untuk menjadi pemimpin yang baik. Pengalaman organisasi yang matang juga sangat dibutuhkan agar seorang pemimpin dapat lebih mengetahui bagaimana menciptakan suatu kepemimpinan yang memang dibutuhkan oleh bawahannya. Seorang pemimpin harus memiliki karakteristik serta kemampuan yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. (2006). *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika (1920-1940): Refleksinya Dalam Novel Layar Terkembang dan My Mortal Enemy*. Makassar: Eramedia.
- Anwar, Idwar. (2000). *Sejarah Luwu. Palopo*: PustakaSawerigading bekerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Nasional Kota Palopo
- Astuti, Widi. (2013). *Perempuan Pejuang: Sejarah Para Perempuan Pejuang di Nusantara*, Salatiga: Penerbit Konstanta.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Dr. Kartini. (2009). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu ?*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, Murni. (2009). *Bahasa dan Gender dalam Masyarakat Bugis*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho, Dr.Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Dr.Riant. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Kota Palopo. (2011). *Profil Statistik & Indikator Gender Kota Palopo. Palopo* : Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo.
- Pemerintah Kota Palopo. (2014). *Profil Statistik Gender & Anak Kota Palopo. Palopo* : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.
- Santoso, Anang. (2009). *Bahasa Perempuan: Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Soetjipto, Ani Widayani. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.